I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Ekonomi adalah proses yang menyebabkan GNP (*Gross National Product*) perkapita atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang, berdasarkan definisi tersebut yang terpenting dalam pembangunan yaitu perubahan terus menerus, adanya usaha menarik pendapatan masyarakat dan kenaikan yang terjadi dalam jangka panjang. Lebih spesifik lagi dapat didefinisikan sebagai upaya meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi *real* dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Pendapatan daerah harus ditingkatkan karena semakin bertambahnya jumlah penduduk memengaruhi kebutuhan ekonomi yang juga semakin bertambah dan semakin kompleks setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang cukup luas untuk membuat perencanaan pembangunan diwilayahnya masing-masing. Kewenangan ini mencakup perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan wilayah dan pemanfaatan secara optimal potensi wilayah.

Wewenang yang telah diberikan kepada daerah hendaknya dipertanggungjawabkan secara optimal oleh daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah yang kemudian terjadinya pertumbuhan ekonomi lewat usaha meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, daerah memiliki budaya dan keunikan masing-masing yang memiliki nilai lebih daripada daerah lain. Oleh karena itu pemerintah harus lebih mengenal dan teliti memperhatikan setiap potensi yang ada untuk mendongkrak pendapatan asli daerah tersebut.

Menurut Tarigan (2007), untuk menggali pendapatan asli suatu daerah tidak berarti menetapkan tarif yang tinggi dari objek pajak yang ada ataupun memperbanyak jenis kutipan dari objek yang sama karena apabila besarnya kutipan per jenis kegiatan di wilayah kita jauh melebihi kutipan diwilayah tetangga, hal ini bisa membuat investor memindahkan lokasi kegiatannya kewilayah lain dan investor baru enggan untuk masuk ke wilayah kita. Apabila hal ini terjadi, kerugian bagi wilayah tersebut akan sangat besar karena perkembangan dan pertumbuhan wilayah akan sangat terhambat, dengan dana yang tersedia, pemerintah daerah harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga objek pajak menjadi bertambah.

Meskipun objek pajak bertambah dan dengan tarif yang wajar pendapatan asli daerah akan terus meningkat, artinya pemerintah daerah harus jeli dalam menetapkan visi, misi, strategi dan prioritas dalam perencanaan pembangunan wilayah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan ekonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Indikator makro ekonomi yang sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.

Kuznetz dalam Jhingan (2013), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperluakan. Definisi ini memiliki 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara

cepat. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dari tahun ke tahun dan PDRB merupakan tolak ukur perkembangan ekonomi secara regional yang dapat digunakan sebagai perencanaan pembangunan Nasional. PDRB suatu wilayah dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berada di wilayah tersebut.

Terdapat 18 sektor lapangan usaha di Kabupaten Simalungun yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan listrik dan gas; 5. Pengadaan air, Limbah, Sampah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, 8. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 9. Transportasi dan Pergudangan; 10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 11. Informasi dan Komunikasi; 12. Jasa Keuangan dan Asuransi; 13. Real Estate; 14. Jasa Perusahaan; 15. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 16. Jasa Pendidikan; 17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 18. Jasa Lainnya (Badan Pusat Statistik, 2019).

B. PERUMUSAN MASALAH

Pada umumnya penduduk Simalungun yang bekerja di sektor pertanian sebanyak (50,74%) kemudian disektor Perdagangan Besar, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi/ jasa-jasa, hotel dan restoran sebesar 17,78. Dari data tersebut persentase penduduk yang bekerja di bidang pertanian lebih dari 50%. Karena letak wilayah yang strategis, Kabupaten Simalungun memiliki kekayaan alam yang sangat beragam penghasil padi terbesar keempat tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat 18 sektor lapangan usaha di Kabupaten Simalungun, sektor tersebut memerlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memfokuskan potensi-potensi yang ada dan bukan hanya memanfaatkan secara maksimal tetapi juga menjaga dan memikirkan keberlanjutan sektor-sektor ekonomi tersebut untuk meningkatkan PDRB

Kabupaten Simalungun. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dilihat dari peningkatan PDRB, maka diperlukan pembangunan ekonomi yang mengacu pada sektor unggulan, jika telah diketahui sektor ekonomi apasaja yang menjadi sektor unggulan maka sektor ekonomi lainnya akan mendapat pengaruh kemajuan dari sektor unggulan tersebut. Agar mengetahui sektor unggulan yang ada di Kabupaten Simalungun saat ini, pemerintah harus melakukan analisis terhadap sektor-sektor ekonomi unggulan daerah dengan membandingkan daerah yang lebih besar (Provinsi Sumatera Utara) sebagai arah penentu kebijakan kedepannya. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dengan Pendekatan *Dynamic Location Quetiont*".**

Berdasarkan permasalahan tersebut yang telah diuraikan, sehingga diambil rumusan masalah :

1. Apasajakah sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Simalungun pada masa yang akan datang?
2. Apakah sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Simalungun pada masa yang akan datang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Simalungun pada masa yang akan datang.
2. Mengetahui apakah sektor pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Simalungun pada masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam mengutamakan meningkatkan sektor unggulan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu masyarakat serta untuk membantu masyarakat dalam memahami sektor ekonomi unggulan di daerahnya pada masa yang akan datang sehingga dapat bersama mendukung program pemerintah untuk meningkatkan sektor-sektor basis tersebut.